

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 16 JANUARI – 4 MARET 2024
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Januari s.d. 6 Februari 2024
dan Masa Reses Mulai Tanggal 7 Februari s.d. 4 Maret 2024)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

I. Kinerja Fungsi Legislasi

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

1. RUU tentang Perubahan atas UU Penyiaran sedang dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Baleg DPR RI.
2. Baleg DPR RI pada tanggal 17 Januari 2024 telah mengundang Komisi I DPR RI untuk membahas hasil kajian harmonisasi Badan Legislasi terhadap RUU tentang Penyiaran.

II. Kinerja Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 tidak terdapat penjadwalan Rapat Anggaran dari Badan Anggaran DPR RI.

III. Kinerja Fungsi Pengawasan

A. Kunker Reses Komisi I DPR RI

Tanggal 7 – 10 Februari 2024 ke daerah sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat (Bandung), dalam rangka mengetahui Penguatan Peran LPP RRI Bandung sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyiarkan konten Pemilu 2024 yang Jurdil;



- Provinsi Jawa Barat (Depok), dalam rangka mengetahui Peran BSSN dalam menghadapi serangan siber pada Pemilu 2024 dalam konteks kesiapan hardware, software dan SDM;



- Provinsi Banten, dalam rangka mengetahui Analisis BIN terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

B. Kunker Luar Negeri Komisi I DPR RI

Tanggal 25 Februari – 2 Maret 2024 (Belanda dan Jerman) dan tanggal 1 – 7 Maret 2024 (Turki), dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan R.I. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, dan untuk memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI sebagai berikut:

- Jerman (Ankara);



- Belanda (Amsterdam);



3. Turki (Ankara).



IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.

Jakarta, 19 Maret 2024
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

TTD

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001